

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurahman. A dan Soejono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Adam Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, Angga Eko Prasetyo, Sukendar, 2022, *Kapita Selekta Hukum Pidana suatu pengenalan dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Girlye. L.A. Ginting, 2024, *Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Kohabitasi*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan.
- J.E. Sahepty, 1996, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Jur. Andi Hamzah, 2017, *Hukum pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Roeslan Saleh mengutip Antonie A.G. Peter, 1981, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksana Baru, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-2, PT RajaGrafindo, Depok.
- Syaiful Bakri, dkk (editor), 2014, *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2019, *Kriminalisasi dalam hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Uning Pratimaratri, 2008, 'Kebijakan Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Reproduksi (Kloning)', Program Doktor Ilmu Hukum universitas Diponegoro, Semarang.
- Wojowarsito, 1992, *Kamus Umum Bahasa Belanda*, PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam

Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Peraturan Kepala Desa Karangsono Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Karangsono Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Lingkungan Desa Karangsono

C. Sumber lain

Abdul Mutalib dan Nur Azizah Rahman, 2020, 'Kebijakan Adopsi Nilai-Nilai Agama (Islam) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Terhadap Pasal 418 RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri di Luar Perkawinan yang Sah/Kumpul Kebo)', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Volume 6, Nomor 3, hlm 500-501.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016, *Masalah Tindak Pidana Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam R KUHP*, Supriyadi Widodo Eddyono, diakses 24 januari 2025, <https://reformasikuhp.org/masalah-tindak-pidana-kumpul-kebo-cohabitation-dalam-r-kuhp/>

Anton Sudanto, 2017, 'Penerapan Sistem Pidanaan dalam Tindak Pidana Perzinahan dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil di Indonesia', *Jurnal Staatrechts*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 143.

CNBC Indonesia, 2024, *Muncul Fenomena Makin Banyak orang RI Kumpul Kebo, Ada Apa?*, Rindi Salsabilla Putri, diakses 10 oktober 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20241005185528-33-577267/muncul-fenomena-makin-banyak-orang-ri-kumpul-kebo-ada-apa>

- Dhestiani Amara Putri, Mutiara Aghata, Riska Andi Fitriono, 2021, 'Lokika Sanggraha Berdasarkan Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps Menurut Teori Kriminologi', *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 8.
- Dion Valerian, 2022, 'Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen', *Jurnal UNPAR*, Volume 8, Nomor 2, hlm 422.
- Hasna Hamidah, Tajul Arifin, 2024, 'Kohabitasi Dalam Perspektif H.R. Al-Tirmidzi Dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Volume 3, Nomor 3, hlm 150.
- Kamus, 2012-2024 Versi 2.9, KBBI DARING, diakses tanggal 2 februari 2025 <https://kbbi.web.id/kriminalisasi>
- HukumOnline.com, 2023, *Pasal yang Menjerat Pelaku Kohabitasi*, Dian Dwi Jayanti, diakses 23 oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-yang-menjerat-pelaku-kohabitasi-lt52217ea9da3ff/>
- Institute For Criminal Justice Reform, 2017, *Melihat Hasil Pembahasan R KUHP 2017 dan Proyeksinya Kedepan*, diakses 24 januari 2025, <https://icjr.or.id/melihat-hasil-pembahasan-r-kuhp-2017-dan-proyeksinya-kedepan/>
- Marthen H. Toelle, 2014, 'Kriminalisasi Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Pidana', *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 8, Nomor 2, hlm. 17.
- Salman Luthan, 2009, 'Asas Dan Kriteria Kriminalisasi', *Jurnal Hukum*, Volume 16, Nomor 1, hlm 1.
- Syamsul Fatoni, 2020, 'Penghapusan Kriminalisasi terhadap Hakim dan Jaksa dalam Rangka Mewujudkan Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, hlm. 229-230.
- Syiais Nurhadi, 2020, 'Formulasi Kebijakan Kriminalisasi Perzinaan dalam RUU KUHP (RUU KUHP 5 September 2019)', *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 9.